



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh:

**M. Nasir bin Sa'ir**, Tempat/tanggal lahir: Lalan, 22 Agustus 1965, (Umur 56 tahun), NIK 1303072208650001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon I**;

**Rosmalinda binti Jamara**, Tempat/tanggal lahir: Lalan, 07 Mei 1971, (Umur 50 tahun), NIK 1303074705710003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya bertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 22

Hal. 1 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, di depan petugas P3NTR yang bernama Syarifuddin, dan wali nikah Pemohon II adalah pak etek (adik kandung ayah Pemohon II) yang bernama Jal (lupa nama panjang), karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1984, dengan saksi-saksi bernama Nito Faat dan Nito Najar, dengan mahar uang 1 (Satu) buah Al-Qur'an, dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah, tetapi saat itu 15 hari setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah petugas P3NTR mengalami sakit parah dan tidak lama kemudian P3NTR meninggal dunia, dan petugas P3NTR belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama-sama di Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) oranganakyang bernama:
  - 6.1. Tanti Nasiriah binti M. Nasir, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 1988;

Hal. 2 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Ica Putri Nayansari binti M. Nasir, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 1993;
- 6.3. Restika Ameliabinti M. Nasir, perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 1998;
- 6.4. Hilda Wulandaribinti M. Nasir, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2004;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan dokumen kependudukan, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:  
Primer:

Hal. 3 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Nasir bin Sa'ir**) dengan Pemohon II (**Rosmalinda binti Jamara**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Hakim menasehati para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap pada pemohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. M. Nasir (Pemohon I) dan Rosmalinda, NIK 1303072208650001, dikeluarkan tanggal 26 September 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rosmalinda (Pemohon II), NIK 130374705710003 dikeluarkan tanggal 26 September 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga M. Nasir (Pemohon I), Nomor 1303071312070102 dikeluarkan tanggal 21 Februari 2018 oleh

Hal. 4 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin tidak terdaftar, Pemohon II sebagai isteri, status kawin tidak terdaftar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

## Bukti Saksi:

1. **M. Arif bin Sa'ir**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon I, oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 22 Oktober 1987;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Jal, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Nito Faat dan Nito Najar, ada maharnya tapi saksi tidak ingat, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal. 5 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA karena 15 hari setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah petugas P3NTR mengalami sakit parah dan tidak lama kemudian P3NTR meninggal dunia, dan petugas P3NTR belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

**2. Martiyus bin Jamara**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 22 Oktober 1987;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Jal karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ada 2 (orang) laki-laki yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut namun saksi tidak ingat namanya, ada maharnya namun saksi lupa, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak

Hal. 6 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena 15 hari setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah petugas P3NTR mengalami sakit parah dan tidak lama kemudian P3NTR meninggal dunia, dan petugas P3NTR belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana diamsud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (M. Nasir bin Sa'ir) telah menikah dengan Pemohon II (Rosmalinda binti Jamara) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Jal karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Nito Faat dan Nito Najar, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Qur'an dibayar tunai, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar pemohonannya dikabulkan;

Hal. 8 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (M. Nasir bin Sa'ir) telah menikah dengan Pemohon II (Rosmalinda binti Jamara) pada tanggal 22 Oktober 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Jal karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Nito Faat dan Nito Najar, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Qur'an, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;

Hal. 9 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena 15 hari setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah petugas P3NTR mengalami sakit parah dan tidak lama kemudian P3NTR meninggal dunia, dan petugas P3NTR belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Oktober 1987, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Jal karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Nito Faat dan Nito Najar, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Qur'an, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 1987. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim menafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan

Hal. 12 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (M. Nasir bin Sa'ir) dengan Pemohon II (Rosmalinda binti Jamara) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan wali nikah Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Jal karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Nito Faat dan Nito Najar, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Qur'an, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 13 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Nasir bin Sa'ir**) dengan Pemohon II (**Rosmalinda binti Jamara**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1987 di Masjid Sya'da Lalan Jorong Lalan, Kenagarian Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Memerintahkan Pemohon I (**M. Nasir bin Sa'ir**) dengan Pemohon II (**Rosmalinda binti Jamara**) untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 14 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Syahminar, S.H.I, M.H**

**Robbil Alfires, S.Sy**

## PERINCIAN BIAAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	..., -
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	..., -
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Sijunjung, 09 Februari 2022  
Salinan Sesuai ini dengan Aslinya  
Panitera

**Drs. NURFADHIL**

Hal. 15 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.SJJ